

ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011-2013

CORİYATI

Alumni Program Studi D IV Keuangan Daerah FEB Universitas Jambi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Sarolangun dan untuk mengetahui perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian selama tiga tahun anggaran adalah rendah sekali dengan rata-rata 4,26 persen, rasio efektivitas selama tiga tahun anggaran adalah sangat efektif dengan rata-rata 102,2 persen, rata-rata rasio aktivitas selama tiga tahun anggaran pada belanja operasi sebesar 66,77 persen dan pada belanja modal sebesar 27,12 persen, rasio pengelolaan belanja mengalami surplus anggaran setiap tahunnya dan memiliki rata-rata sebesar 104,85 persen, serta pada rasio pertumbuhan PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,13 persen dan Pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,45 persen, sedangkan rasio belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,46 persen dan rasio belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,99 persen. Adapun perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci: *Analisis Rasio, Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah*

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang di atur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggungjawab. Sebagai landasan pertanggung jawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun diinternal itu sendiri.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi, Mahsun, (2006:145) dalam Fidelius (2013). Adapun perekonomian Kabupaten Sarolangun lebih didukung oleh sektor pertanian. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sarolangun sebesar 22,97 persen pada tahun 2012 laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 15,28 persen dan pada tahun 2013 laju pertumbuhan

Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan lagi sebesar 19,55 perse. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel. 1 dibawah ini :

Tabel. 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013 (Dalam Persen)

No	Tahun	PDRB
1	2011	22,97
2	2012*	15,28
3	2013**	19,55

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun

Belanja pemerintah daerah pada tahun 2011 untuk belanja operasi sebesar Rp. 448.053.261.274,00 dan untuk belanja modal sebesar Rp. 85.875.313.011,00, pada tahun 2012 untuk belanja operasi meningkat sebesar Rp. 505.578.240.245,00 dan untuk belanja modal meningkat sebesar Rp. 219.506.728.078,00, serta pada tahun 2013 terjadi peningkatan lagi untuk belanja operasi sebesar Rp. 538.695.602.444,00 dan untuk belanja modal menurun sebesar Rp. 199.497.286.754,00. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel. 2 dibawah ini :

Tabel. 2. Perkembangan Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal
1	2011	448.053.261.274,00	185.875.313.011,00
2	2012	505.578.240.245,00	219.506.728.078,00
3	2013	538.695.602.444,00	199.497.286.754,00

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya, Halim Abdul (2007). Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Hal tersebut di atas mendorong untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013 “.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang di tunjukkan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan atau menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk atau generalisasi.

Jenis Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi terkait yang meliputi : Data Laporan Realisasi Anggaran, Data Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, Data PDRB, Data Jumlah Penduduk dan Data Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun.

2. Data Primer

Data Primer diperoleh dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara.

Sumber Data

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun.
2. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sarolangun.
3. Perpustakaan

Metode Analisis Data

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu melihat besarnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut :

Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah, Halim Abdul (2012).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel. 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Realisasi PAD	Rasio Kemandirian %	Keterangan
1	2011	634.189.080.943,69	31.605.925.980,21	4,98	Rendah sekali
2	2012	723.561.999.052,79	28.007.764.671,40	3,87	Rendah Sekali
3	2013	791.613.688.633,50	31.307.607.303,24	3,95	Rendah Sekali
Rata-rata				4,26	Rendah Sekali

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 4,98 persen dengan kategori rendah sekali, menurun sebesar 3,87 persen ditahun 2012 dengan kategori rendah sekali serta meningkat 0,08 persen ditahun 2013 menjadi 3,95 persen dengan kategori rendah sekali.

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 4,26 persen dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25 persen). Ini berarti bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman pada APBD masih kecil dan juga berarti bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam APBD yang dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, dana perimbangan serta lain-lain penerimaan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Meskipun kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan rasio kemandirian Kabupaten Sarolangun dikategorikan rendah sekali tetapi perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat yang bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mandiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil, Halim Abdul (2012).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 2. Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 -2013 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
1	2011	26.896.483.592,00	31.605.925.980,21	117,51	Sangat Efektif
2	2012	31.453.982.000,00	28.007.764.671,40	89,04	Cukup Efektif
3	2013	31.293.482.000,00	31.307.607.303,24	100,05	Sangat Efektif
Rata-rata				102,2	Sangat Efektif

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sarolangun selalu berubah di setiap tahunnya. Dimana rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sarolangun tertinggi di capai pada tahun 2011 yaitu sebesar 117,51 persen dengan kategori sangat efektif namun di tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 89,04 persen dengan kategori cukup efektif dan meningkat kembali ditahun 2013 sebesar 100,05 persen dengan kategori sangat efektif.

Rasio efektivitas keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 102,2 persen dapat dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitas melebihi 100 persen sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dianggap berhasil dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli daerahnya sehingga melebihi target anggaran yang ditetapkan.

Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi atau pada belanja modal secara optimal, Halim Abdul (2012).

Tabel. 3. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi	Total APBD	Rasio Belanja Rutin %
2011	448.053.261.274,00	665.795.006.923,90	67,29
2012	505.578.240.245,00	751.569.763.724,19	67,26
2013	538.695.602.444,00	822.921.295.936,74	65,56
Rata-Rata			66,70

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari perhitungan rasio belanja operasi Kabupaten Sarolangun dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio belanja operasi sebesar 67,29 persen dan menurun sebesar 0,3 persen menjadi 67,26 persen pada tahun 2012 serta menurun lagi ditahun 2013 sebesar 1,7 persen sehingga rasio belanja operasi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 menjadi 65,56 persen dengan rata-rata 66,70 persen.

Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

**Tabel. 4. Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Belanja Modal	Total APBD	Rasio Belanja Modal
2011	185.875.313.011,00	665.795.006.923,90	27,92
2012	219.506.728.078,00	751.569.763.724,19	29,20
2013	199.497.286.754,00	822.921.295.936,74	24,24
Rata-Rata			27,12

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)*

Dari perhitungan rasio belanja modal Kabupaten Sarolangun dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio belanja modal sebesar 27,92 persen dan meningkat sebesar 1,28 persen menjadi 29,20 persen pada tahun 2012 namun menurun lagi ditahun 2013 sebesar 4,96 persen sehingga rasio belanja modal Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 menjadi 24,24 persen dengan rata-rata 27,12 persen.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sarolangun lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun perlu menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun walaupun patokan untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah seharusnya meningkatkan belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Rasio Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, Fidelius (2013). Rasio ini menunjukkan adanya surplus/defisit anggaran.

Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit = Total Pendapatan – Total Belanja

Tabel. 5. Laporan Surplus atau Defisit Anggaran Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Surplus/defisit
2011	665.795.006.923,90	634.977.459.085,00	30.817.547.838,90
2012	751.569.763.724,19	725.384.968.323,00	8.326.890.776,58
2013	822.921.295.936,74	777.889.586.009,00	45.031.709.927,74

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari perhitungan pengelolaan belanja di atas dapat dilihat bahwa kinerja laporan anggaran pengelolaan belanja pada tahun 2011 menunjukkan adanya surplus sebesar Rp. 30.817.547.838,90, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.326.890.776,58 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 45.031.709.927,74. Hal ini bisa disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya.

Rasio Pengelolaan Belanja

$$\text{Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel. 6. Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Rasio Pengelolaan Belanja
2011	665.795.006.923,90	634.977.459.085,00	104,85
2012	751.569.763.724,19	725.384.968.323,00	103,61
2013	822.921.295.936,74	777.889.586.009,00	105,79
Rata-Rata			104,75

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari perhitungan rasio pengelolaan belanja di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio pengelolaan belanja sebesar 104,85 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 103,61 % serta meningkat lagi ditahun 2013 sebesar 105,79. Rata-rata rasio pengelolaan belanja Kabupaten Sarolangun sebesar 104,75 persen. Hal ini bisa disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan tersebut disertai dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menekan realisasi atas belanja. Sehingga total belanja pemerintah Kabupaten Sarolangun lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya, Halim Abdul (2012). Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan:

Tabel. 7. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	PAD (Rp)	31.605.925.980,21	28.007.764.671,40	31.307.607.303,24	
	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	-	-11,38	11,78	0,13
2	Total Pendapatan (Rp)	665.795.006.923,90	751.569.763.724,19	822.921.295.936,74	
	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	-	12,88	9,49	7,45
3	Belanja Operasi (Rp)	448.053.261.274,00	505.578.240.245,00	538.695.602.444,00	
	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	-	12,84	6,55	6,46
4	Belanja Modal (Rp)	185.875.313.011,00	219.506.728.078,00	199.497.286.754,00	
	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)	-	18,09	-9,11	2,99

Sumber :DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 menunjukkan pertumbuhan yang negatif pada tahun 2012 yaitu menjadi -11,38 persen, tetapi meningkat pada tahun 2013 menjadi 11,78 persen dengan rata-rata yang hanya 0,13 persen, ini dikarenakan PAD Kabupaten Sarolangun 2011 lebih besar di bandingkan PAD 2012. Rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, pada tahun 2012 rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sarolangun sebesar 12,84 persen, namun menurun pada tahun 2013 menjadi 9,49 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,45 persen . Sehingga dapat disimpulkan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sarolangun baik walaupun pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 negatif, tetapi pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun

meningkat ditahun 2013 dan walaupun pertumbuhan pendapatan tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2012 tetapi setidaknya pemerintah mampu mempertahankan penerimaan pendapatan dan tetap mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Pertumbuhan belanja Kabupaten Sarolangun yaitu belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, pada tahun 2012 pertumbuhan belanja operasi sebesar 12,84 persen dan menurun ditahun 2013 sebesar 6,55 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,46 persen sedangkan pertumbuhan belanja modal pada tahun 2012 sebesar 18,09 persen dan pada tahun 2013 sebesar -9,11 persen yaitu negatif atau tidak mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 2,99 persen. Hal ini diakibatkan karena belanja modal pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan dengan belanja modal tahun 2013.

Perkembangan Pendapatan (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013

Ditetapkannya Kabupaten Sarolangun sebagai daerah otonom membawa perubahan yang sangat baik dalam sistem pemerintah daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut dapat memberikan kewenangan kepada Kabupaten Sarolangun untuk mengurus dan menggali sumber daya yang ada di Kabupaten Sarolangun dalam upaya meningkatkan pendapatan keuangan daerah dari sistem pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan keuangan daerah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan daerah.

Perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 dapat dilihat dari tabel 5.8 dibawah ini.

Tabel. 8. Perkembangan Pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah (APBD)	Peningkatan
2011	665.795.006.923,90	-
2012	751.569.763.724,19	85.774.756.800,29
2013	822.921.295.936,74	71.351.532.212,55

Simpulan

1. Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 4,26 persen dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25 persen).
2. Rasio efektivitas keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 102,2 persen dapat dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitas melebihi 100 persen.
3. Rata-rata rasio belanja operasi sebesar 66,77 persen dan rata-rata rasio belanja modal sebesar 27,12 persen.
4. Kabupaten Sarolangun mengalami surplus anggaran dari tahun ketahun dan memiliki rata-rata rasio pengelolaan belanja sebesar 104,85 persen.

5. Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 memiliki rata-rata sebesar 0,13 persen. Rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 memiliki rata-rata sebesar 7,45 persen. Pertumbuhan belanja Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 yaitu belanja operasi memiliki rata-rata sebesar 6,46 persen sedangkan pertumbuhan belanja modal memiliki rata-rata sebesar 2,99 persen.

Saran-saran

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi perluasan lapangan kerja Kabupaten Sarolangun agar pendapatan masyarakat Kabupaten Sarolangun meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula
3. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Sarolangun dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Sarolangun

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, 30 Mei 2012, *Banyak Temuan BPK Beri Opini WDPI*, www.metrojambi.com/v1/daerah/4130-banyak-temuan-bpk-berikan-opini-wdp.html.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, 23 Mei 2013, *Opini WDP untuk LKPD Kabupaten Sarolangun, Tebo dan Bungo*, www.jambi.bpk.go.id/?p=5143#.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, *Sarolangun Dalam Angka Periode 2011 sampai 2013*, Sarolangun : BPS.
- Bagus Suryono, Wiratno, 2012, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro.
- Darise, Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks, Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun, *Sarolangun Dalam Angka Periode 2011 sampai 2013*, Sarolangun : DISPENDA
- Fidelius, 2013, *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah*, Jurnal EMBA, ISSN : 2303 – 1174, Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal 2088 – 2096, Universitas Sam Ratulangi : Manado.
- Halim, Abdul, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Ichwan, Rudi, 08 Juni 2014, *Pontang-Panting Kejara WTP, Ehhh Malah Dapat WDP*, www.infojambi.com/peristiwa/11216-pontang-panting-kejar-wtp-ehhh-malah-dapat-wdp.html.

- Julitawati, Ebit, 2012, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal EMBA*, ISSN 2302-0164, Volume 1, No. 1, Agustus. Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh.
- Kuncoro, Thesaurianto 2007, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Timur. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2006, *Akuntansi Pemerintahan Daerah (Konsep dan Aplikasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.